

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dunia dikejutkan dengan munculnya virus Corona jenis baru pada awal 2020. Virus itu kemudian dikenal (*SARSCoV2*) yang disebut dengan *Coronavirus Disease 2019*. Virus ini muncul di sebuah lokasi penjualan hewan di Kota Wuhan Cina, kemudian menyebar ke 65 negara di dunia yang ikut terjangkiti dan terinfeksi oleh virus Corona jenis baru ini. (Data WHO, 1 Maret 2020). Ini bukan pertama kalinya virus Corona muncul. Pada tahun 2002, *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) disebabkan oleh Coronavirus SARS (*SARSCoV*) dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) pada tahun 2012 disebabkan oleh *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (*MERSCoV*), dengan total kurang lebih 10.000 kasus (1.000 kasus *Middle East Respiratory Syndrome* dan 8.000 kasus SARS). Angka kematian akibat SARS sekitar 10%, sedangkan angka kematian MERS bahkan lebih tinggi, sekitar 40%. (Yuliana, 2020 : 187).

Berbagai dampak bermunculan akibat menyebarnya virus ini, dampak ekonomi, kesehatan juga berdampak terhadap dunia pendidikan di seluruh dunia. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Corona atau COVID-19 yaitu banyaknya perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan terjadi penurunan gaji atau upah buruh dan karyawan sejak bulan Agustus 2020. Menurut data BPS sudah turun 5,2 persen, dari Rp2,89 juta ke Rp2,76 juta (BPS, 2020). Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar selama masa pandemi.

Masyarakat yang tergolong kaya dengan tingkat perekonomian yang mapan bisa bertahan bahkan harta kekayaannya meningkat dari sebelum pandemi terjadi.

Berbagai kegiatan ekonomi menjadi terpuruk, banyak perusahaan yang terpaksa di tutup karena alasan efisiensi yang menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Adanya pembatasan kegiatan atau aktivitas di tempat umum berdampak juga pada usaha barang dan jasa dan secara umum kegiatan usaha menjadi tingkat kemiskinan juga meningkat secara signifikan. Dari data BPS memperlihatkan dalam rentang 5 tahun belakangan 45 persen total pengeluaran nasional sebanyak 20 persen di dominasi oleh masyarakat kalangan menengah ke atas, sedangkan masyarakat kalangan menengah ke bawah hanya 17 persen dari total pengeluaran nasional.

Untuk mengatasi dampak pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat miskin dan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadi resesi ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Seandainya ini tidak dilakukan maka diprediksi tingkat kemiskinan bisa melonjak hingga di atas 20 persen. Berbagai persoalan kemudian muncul, adanya masyarakat yang terkait kasus korupsi kemudian, karyawan yang kemudian terjerat kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai kelompok keluarga miskin dan penerima bantuan akibat dampak pandemi kemudian menjadi kelompok keluarga miskin yang seharusnya juga mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi tidak terdaftar sebagai keluarga yang mendapat bantuan dari desa yang bersangkutan.

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap ekonomi sebagian besar masyarakat tidak terkecuali perekonomian di desa walaupun saat ini dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat kota dikarenakan mobilitas perekonomian masyarakat perkotaan lebih didominasi oleh barang dan jasa serta pekerjaan pada perusahaan-perusahaan manufaktur, namun dikarenakan mobilitas pekerja musiman yang bekerja di kota tinggi dan di saat pandemi mereka kembali ke tempat asal masing-masing maka dampak perekonomian juga merebak ke desa. Kegiatan mudik yang dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini menjadi salah satu penyebab meluasnya penyebaran virus COVID-19 di wilayah pedesaan.

Di masa pandemi COVID-19, ketika banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terkena dampaknya, misalnya di bidang sosial, ekonomi dan politik bahkan perencanaan dan pembangunan desa terpengaruh. Badan Pusat Statistik (bps.go.id) September 2019 angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 24,79 juta jiwa meningkat 0,56%, pada Maret 2020 angka kemiskinan di Indonesia menjadi 26,42 juta orang, dengan persentase penduduk miskin ini pada Maret 2020 naik menjadi 9,78% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Dampak penyakit virus Corona 2019 (COVID-19) yang hanya tercatat pada Maret 2020 dari survei BPS Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua daerah mengalami peningkatan, dari 34 provinsi 22 di antaranya mengalami peningkatan kemiskinan.

Dengan melihat angka kemiskinan yang semakin meningkat karena virus Corona *desease* 2019 (COVID-19) sehingga pemerintah melakukan program sosial untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena penyakit virus

Corona 2019 (COVID-19), tujuan pemerintah adalah program bantuan sosial dapat dilaksanakan. berdampak baik dan sesuai dengan yang diharapkan tujuan (Akib & Risfaisal, 2015). Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) program yang dirancang oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat miskin dan masyarakat terdampak penyakit virus Corona 2019 (COVID-19), dengan Bantuan Langsung Dana Desa (Cash Bantuan Dana Desa) dapat membantu masyarakat. Program yang dilakukan oleh pemerintah semua akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dan kemudian akan diberikan kepada orang miskin dan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung, kata Presiden Indonesia dalam sambutannya pemerintah akan memberikan bantuan yang nantinya akan diterima untuk keluarga yang terkena penyakit virus Corona 2019 (COVID-19) dan kepada fakir miskin, dengan uang tunai sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan pertama April, Mei, Juni kemudian diperpanjang hingga Desember 2020 yang pada bulan-bulan berikutnya diubah menjadi Rp300.000 karena ada perpanjangan waktu untuk keluarga penerima BLT-DD dan akan tetap mendapatkan pasokan dana bantuan dari pemerintah.

Kebijakan BLT Dana Desa bertujuan untuk meringankan beban masyarakat akibat COVID-19 akan tetapi juga membuka peluang adanya penyalahgunaan dana desa tersebut baik secara sengaja atau tidak oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran dan penyelenggaraan BLT-DD tersebut baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Kesimpulan ini berdasarkan dari kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT)

saat kenaikan harga BBM yang dalam penyelenggaraan banyak bermasalah seperti penetapan masyarakat yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan hingga proses penyaluran dana bantuan BLT itu sendiri, kemudian tujuan pemberian bantuan itu tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, sehingga dalam beberapa kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu (Rosfadhila dalam Herdiana dkk, 2021. 2-3).

Langsa salah satu kota di Propinsi Aceh yang dulunya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001. Masyarakat kota Langsa merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia seperti Aceh, Gayo, Minang, Batak dan Karo serta suku Bugis yang sudah beberapa generasi tinggal di Langsa. Kota Langsa hanya berjarak sekitar 246 KM dari Kota Medan menyebabkan Langsa mempunyai banyak kemiripan dengan kota Medan, dan banyak masyarakat Kota langsa sendiri yang bekerja di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya terutama di sektor industri.

Pada Juli 2021 masyarakat Kota Langsa yang terpapar COVID-19 sebanyak 614 kasus dan 539 diantaranya dinyatakan sembuh (Dinkes Aceh, 2021). Pandemi COVID-19 mempunyai dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Birem Puntong. Adanya pembatasan kegiatan ekonomi secara signifikan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan makin meningkatnya pengangguran di Kota langsa, hal ini terutama terjadi pada masyarakat yang bekerja di sektor industri yang banyak terdapat di kawasan industri di Kota Medan. Dampak pandemi COVID-19 secara ekonomi menyebabkan tingkat pendapatan

masyarakat karena pembatasan kegiatan ekonomi yang kemudian berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan menurunnya tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan data dari pemerintahan Desa Birem Puntong pada tahun 2020 sudah disalurkan dana BLT Dana Desa untuk 161 KK. Calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Keterkaitan penelitian yang saya lakukan dengan Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah berkaitan dengan Nilai-Nilai Pancasila yaitu sila Ke-5. Dimana dijelaskan pada sila ke-5 yaitu “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan langsung tunai dari pihak desa. Data penerima dana BLT Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai**

Nama Desa	Nama Dusun	Jumlah Penerima BLTDD (KK)
Desa Birem Puntong	Dusun Pusara	30 KK
	Dusun Pendidikan	29 KK
	Dusun Nelayan	79 KK
	Dusun Mesjid	23 KK

**Sumber: Kantor Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa**

Permasalahan kebijakan BLT Dana Desa di Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Pertama adanya kecemburuan sosial dari warga juga masih menjadi kendala dalam penyaluran bantuannya.

Anjuran dari pemerintah Rp.600.000/keluarga membuat APBDes tidak mencukupi untuk seluruh warga yang berhak menerima sehingga tidak bisa merata. Jika besaran bantuan yang diberikan diubah menjadi Rp.200.000/keluarga maka jumlah penerimanya akan lebih banyak dan bisa merata, Kemudian adanya ketidakpastian atas keberlangsungan pandemi dan neraca keuangan negara, masa pemberian BLT selama 3 bulan belum pasti menjadi jaminan ketercukupan kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa perlu dibimbing untuk membagi dana BLT seperti ini ke dalam dua pos yakni mana yang dibelanjakan untuk kebutuhan dasar saat ini dan mana yang akan disisihkan untuk nanti. Nominal BLT yang diberikan hanya mencakup sebagian kecil dibandingkan kerugian yang dialami warga desa selama darurat COVID-19. Kedua, masalah alokasi dana desa berdasarkan anggaran dana desa dan proporsi yang harus diterima masyarakat menjadi sebuah permasalahan baru dan adanya penilaian sebagian masyarakat yang menganggap penyaluran dana bantuan yang tidak transparan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa yang berwenang mengatur prosedur penyaluran dana serta yang melakukan pendataan terhadap warga yang berhak menerima bantuan menjadikan permasalahan yang terkait bantuan BLT semakin rumit. Ketidaktepatan penerima BLT Dana Desa seperti ada beberapa penerima BLT Dana Desa yang sebenarnya tidak layak atau berkecukupan ekonominya. Keterlambatan pencairan dana BLT Dana Desa dan yang ketiga penerima BLT Dana Desa hanya masyarakat

yang mengenal dan dekat dengan staff desa yang mengurus pembagian BLT Dana Desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan latarbelakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin di Era Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)”.

### **1.2 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya penafsiran permasalahan yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) bagi masyarakat miskin di era pandemi COVID-19 tahun 2020. Maka penelitian ini lebih di tekankan pada Persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin Di Era Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa) ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa).

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pendistribusian BLT bagi masyarakat dan pemerintah.
  - b) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).
  - b) Bagi Pembaca, dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).